



BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR: 783/VIII/2013

II/AGUSTUS 2013



DPR Dorong Pemerintah Tumbuhkan Ekonomi Yang Berkualitas

Jangan lewatkan info DPR terkini dan live streaming TV Parlemen di www.dpr.go.id dan tvparlemen.com

KEGIATAN DPR-RI MINGGU KEDUA AGUSTUS 2013

Minggu kedua bulan Agustus ini, kegiatan Dewan difokuskan kepada kegiatan DPR dalam masa Persidangan ke I tahun sidang 2013-2014, yang akan dibuka secara resmi pada rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang tanggal 16 Agustus 2013. Berikut rangkuman kegiatan dan agenda yang menyertainya:

Oleh: Ketua DPR-RI, DR.H. Marzuki Alié



Agenda Kegiatan Masa Persidangan ke I Tahun Sidang 2013-2014

1. Kegiatan Masa Persidangan I dimulai tanggal 16 Agustus

sampai dengan 25 Oktober 2013, berjumlah 49 hari kerja atau 71 hari kalender.

2. Karakteristik dalam Masa Persidangan I:

a. Sidang bersama DPR RI dan DPD RI untuk mendengarkan pidato Presiden RI dalam rangka HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke-68 (pagi hari).

b. Rapat Paripurna DPR (siang hari) dengan acara:

- Pidato Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2013-2014 oleh Ketua DPR RI
- Pengantar/Keterangan Presiden atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2014.

3. Rapat Paripurna Penetapan Susunan dan Keanggotaan Fraksi-Fraksi dalam Alat Kelengkapan DPR.

4. Rapat Paripurna pembahasan RUU Pertanggungjawaban APBN 2012 (tugas bidang anggaran).

5. Rapat-rapat Paripurna dalam rangka pembahasan RUU APBN 2014 dan Nota Keuangannya (tugas bidang anggaran).

6. Rapat Paripurna pembicaraan tingkat II beberapa RUU prioritas (tugas bidang legislasi).

7. Rapat-rapat Alat Kelengkapan DPR (Komisi-komisi untuk melaksanakan fungsi pengawasan DPR RI).

8. Rapat-rapat Tim Pengawas DPR RI: Tim Pengawas Tindak Lanjut Rekomendasi Panitia Angket DPR RI tentang kasus Bank Century; Tim Pemantau Pelaksanaan UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pelaksanaan UU No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua; Tim Pengawas terhadap penyelesaian Sengketa

Pertanahan dan Konflik Agraria; Tim Pengawas Perlindungan TKI di Luar Negeri.

9. Tugas-tugas lain sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan, diantaranya memberikan persetujuan terhadap calon anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) periode 2013-2018; Pembahasan dan Penanganan atas proses pencalonan Panglima TNI; Proses pembahasan atas calon-calon Hakim Agung dan pemberian pertimbangan terhadap calon duta-duta besar negara sahabat untuk RI.
10. Pola penjadwalan pada Masa Persidangan I tahun Sidang 2013-2014:
 - Pelaksanaan kegiatan fungsi anggaran dan pengawasan dialokasikan kurang lebih 50%, pelaksanaan kegiatan fungsi legislasi 50%
 - Alokasi waktu pelaksanaan fungsi anggaran difokuskan kepada pembahasan RUU APBN TA 2014 yang harus diselesaikan selambat-lambatnya akhir bulan Oktober 2013.
11. Pada hari Kamis 29 Agustus 2013, diselenggarakan rapat Paripurna dalam rangka HUT DPR RI ke-68 dengan agenda pidato Ketua DPR sekaligus laporan kinerja DPR RI untuk Tahun Sidang 2012-2013.
12. Tanggal 3 September 2013, rapat Paripurna pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Pertanggungjawaban dan Pelaksanaan APBN 2012.

Kegiatan Fungsi Legislasi DPR RI

Prolegnas Prioritas Tahun 2013

1. RUU dalam pembicaraan tingkat I; ada 35 RUU baik RUU yang datang dari Pemerintah, maupun dari DPR RI. RUU-RUU tersebut meliputi semua bidang, baik di bidang Polkam, Ekonomi, Kesra maupun di bidang profesi dan berkaitan dengan pembangunan hukum.
2. RUU Kumulatif terbuka tentang pembentukan daerah Provinsi dan Kabupaten ada empat buah.
3. RUU menunggu Surat Presiden ada dua buah, yaitu RUU tentang Perubahan atas UU No.18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan RUU tentang Perubahan atas UU NO.18 tahun 2003 tentang Advokat.
4. RUU dalam Proses penyusunan dan perumusan ada 28 buah (RUU dari DPR RI).
5. RUU usulan baru untuk masuk dalam Prolegnas 2013 (belum disetujui rapat paripurna), yaitu; RUU tentang Radio Televisi RI (RTRI)- diusulkan Komisi I; RUU tentang Perubahan atas UU No.16 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, diinisiasi oleh Baleg DPR; RUU tentang Perubahan atas UU No.5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat-diinisiasi



oleh Baleg; dan RUU tentang Hak Cipta-diusulkan oleh Pemerintah.

6. RUU baru yang sebelumnya tidak masuk dalam Prolegnas 2010-2014 ada dua, yaitu RUU Pengaturan Minuman Beralkohol-diusulkan oleh DPR; dan yang diusulkan oleh Pemerintah yaitu RUU tentang Panas Bumi; RUU tentang Perubahan atas UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban); RUU tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; RUU tentang Perubahan Harga Rupiah; RUU tentang Perubahan atas UU No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Masa Keanggotaan DPR Sampai Dengan 2014

1. TS 2012 : 1 Masa Sidang = 20 hari kerja

19 November 2012 s.d 14 Desember 2012

Masa Kampanye Pemilu: 17 Desember 2012 s.d 5 April 2014

2. TS 2013 : 4 Masa Sidang

MS.III 7 Januari 2013 s.d 12 April 2013= 69 hari kerja

MS.IV 13 Mei 2013 s.d 12 Juli 2013= 44 hari kerja

2 Masa Sidang ± 60 hari kerja

3. TS 2014 : 2 Masa Sidang = ±60 hari kerja

Pemilu: 9 April 2014



DPR Dorong Pemerintah Tumbuhkan Ekonomi Yang Berkualitas

Agar negara mampu mengurangi angka dan pengangguran secara signifikan, DPR mendorong pemerintah agar terus berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, serta harus terdistribusi dan dirasakan oleh seluruh rakyat di seluruh wilayah Indonesia.

Hal itu disampaikan oleh Ketua DPR Marzuki Alie pada Pidato Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2013-2014. Dalam acara ini juga, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pidato dalam rangka Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU APBN 2014 dan Nota Keuangannya.

“Dewan berpendapat, target pertumbuhan ekonomi di atas 6% harus memperkuat pondasi perekonomian nasional, meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta mampu mendorong masuknya investasi asing jangka panjang,” papar Marzuki di hadapan peserta sidang, di Gedung Nusantara, Jumat (16/7).

Investasi jangka pendek, tambah

Marzuki, dinilai kurang signifikan bagi penguatan perekonomian jangka panjang, karena setiap saat dapat ditarik keluar menjadi *capital out-flow*.

Terkait dengan pertumbuhan perekonomian global yang masih melambat sejak krisis 2008, Anggota Dewan meminta pemerintah fokus pada pembenahan perekonomian domestik, antara lain dengan mendesain stimulus fiskal yang efektif guna mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

“Persoalan infrastruktur harus menjadi prioritas utama untuk diatasi, karena akan berdampak pada laju perekonomian secara keseluruhan, melalui strategi yang bersifat komprehensif dan terkoordinasi antar instansi

pemerintah yang efektif,” papar politisi Demokrat ini.

Marzuki menyatakan, momentum pertumbuhan yang positif hendaknya menjadi dasar dalam mengembangkan sektor-sektor produktif, khususnya sektor riil. Pengembangan sektor riil juga harus didukung instrumen kebijakan moneter yang baik, antara lain dengan mengatur fleksibilitas tingkat suku bunga perbankan.

“Intermediasi bank harus mampu menggairahkan ekonomi swasta, termasuk usaha mikro, kecil dan menengah, agar pengembangan UMKM dapat menjadi salah satu pilar ekonomi nasional yang kokoh dari terpaan krisis,” harap Marzuki. (sf) Foto: Wahyu/Parle.

DPR Terus Upayakan Tingkatkan Produk Legislasi

Masyarakat banyak mengkritisi minimnya produk DPR di bidang legislasi. Namun DPR RI terus berupaya untuk meningkatkan produk legislasinya.

Ketua DPR RI Marzuki Alie mengungkapkan, rata-rata tiap tahun 70 RUU yang diputuskan DPR, baik usulan DPR maupun pemerintah, yang meliputi berbagai bidang.

Sampai saat ini, 23 RUU sedang dalam pembahasan tingkat I dan akan selesai pada masa sidang I dan II.

“Saya sudah menyarankan pada anggota untuk menyeimbangkan tiga fungsi (legislasi, anggaran, pengawasan), yaitu 60% fungsi legislasi dan 40% fungsi anggaran dan pengawasan,” ungkap Marzuki baru-baru ini di gedung DPR.

Selalu ada prioritas tiap tahunnya, mana saja RUU yang perlu segera diselesaikan. Penentuan prioritas tersebut atas kesepakatan pemerintah dan DPR. RUU yang sedang dibahas DPR mencakup beberapa sektor, baik ekonomi, politik, hukum, dan sosial kemasyarakatan.

Marzuki juga menjelaskan, masya-



Ketua DPR Marzuki Alie.

rakat perlu diberi pengetahuan yang benar dan lengkap soal mekanisme pembahasan RUU di DPR. Prosesnya cukup panjang dan membutuhkan kecermatan dan ketelitian.

Masyarakat harus paham bahwa urusan RUU meliputi semua proses yang harus dijalani, sejak penyusunan naskah akademik, perumusan RUU, pembahasan, masukan dari

masyarakat, dan sebagainya yang itu memerlukan kecermatan, ketelitian, dan kemampuan. Sehingga, dapat menghasilkan kualitas RUU yang berpihak pada kepentingan rakyat.

DPR, kata Marzuki, tidak ingin RUU yang dihasilkan justru dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi atau bahkan tidak merepresentasikan keinginan masyarakat. (mh) foto: hr/parle.

Dewan Nilai Pidato Presiden Tunjukkan Kenegarawan Yang Baik

Anggota DPR RI, Siswono Yudo Husodo menilai Pidato Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono dalam rangka Penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2014 dalam Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2013-2014, Jumat (16/7) menunjukkan kenegarawan yang baik.

“Saya mendengarkan dan membaca dengan seksama, serta memperhatikan, bahwa presiden menyadari betul kelemahan-kelemahan daripada APBN yang lalu. Terutama pada penyerapan anggarannya yang selalu terjadi pada

tahun-tahun terakhir sehingga terjadi selalu tidak habisnya anggaran”, kata Siswono saat usai mengikuti Sidang Paripurna DPR RI.

Pada Pidatonya itu, jelas Siswono, Presiden memberikan penekanan mengenai antisipasi keadaan yang kurang menggembirakan karena kegiatan politik 2014 yang sangat tinggi terutama menjelang Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden, yang berarti kondisi suasana politik akan sangat panas, apakah itu akan membuat kelancaran APBN, waktu yang akan membuktikan.



Anggota DPR RI, Siswono Yudo Husodo.

Siswono menyatakan, yang cukup menggembirakan, Presiden mengakui bahwa APBN 2014 ini nanti, pada kuartal terakhir akan dilaksanakan oleh Pemerintahan yang baru, dia menekankan bahwa tidak ingin meninggalkan beban-beban bagi pemerintah yang akan datang.

Siswono menilai, APBN 2014 menunjukkan kemajuan yang cukup menggembirakan, peningkatan APBN yang cukup baik, menurunnya defisit terhadap PDB yang tadinya pada tahun 2013 2,3% sekarang hanya 1,5%.

“Saya gembira sekali menyambut kondisi itu. Berkurangnya subsidi BBM, dialihkan untuk infrastruktur. Secara keseluruhan, saya menilai APBN 2014 ini jauh lebih baik daripada APBN 2013 maupun APBNP 2013,” tegas Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar ini.

“Saya berharap APBN 2014 sejak dari awal bisa dilakukan penyerapan dengan sangat baik,” harapnya. (sc) foto:wy/parle.

1526 Teladan Warnai Pembacaan Pidato Kenegaraan



Wakil dari para teladan menyaksikan langsung Pidato Kenegaraan Presiden RI.

Suasana tampak hijau di Kompleks Parlemen. Ini bukan karena diramikan oleh para pendukung salah satu partai politik, melainkan hadirnya 1.526 Teladan dari seluruh Indonesia. Para Teladan ini kompak mengenakan batik hijau untuk menghadiri Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka HUT ke-68 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

Ke-1526 orang ini berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Dari Kementerian Kesehatan terpilih 116 orang berkriteria teladan dokter, perawat, bidan, kesehatan masyarakat dan nutritionis. Tiga ratus orang dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki latar belakang guru, kepala sekolah, pengawas, serta pemenang dalam lomba pendidikan.

Rincian lainnya, Kementerian Kehutanan 279 orang, 3 orang dari Kidzona, Kementerian Dalam Negeri sebanyak 385 orang, 96 orang mewakili Kementerian Agama, 205 orang dari Kementerian Pertanian, BKKB 30 orang, BPS 39 orang, RRI 3 orang, 18 orang dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebanyak 50 orang, dan 2 orang dari Parlemen Remaja.

Kehadiran para Teladan ini mendapat apresiasi dari Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. “Saya apresiasi kepada Teladan yang hadir, mereka putra putri terbaik bangsa yang berjasa di bidangnya masing-masing,” ucap Presiden saat membacakan Pidato Kenegaraan di Gedung Nusantara, Jumat (16/7).

Usai Presiden mengucapkan apresiasinya, seluruh Anggota DPR yang hadir kemudian berdiri dari tempat duduknya, kemudian bertepuk tangan sebagai bentuk apresiasi kepada para Teladan. Teladan yang hadir pun melambatkan tangan untuk membalas apresiasi dari Presiden dan Anggota Dewan. (sf) foto:od/parle.

Presiden Sangat Hati-hati

Pidato Kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam penyampaian RAPBN 2014, dinilai sebagai bentuk kehati-hatian pemerintah dalam menyusun postur RAPBN 2014. Namun, presiden telah menyampaikannya secara konfrehensif.

Demikian disampaikan Anggota Komisi VI DPR Atte Sugandi usai mengikuti Rapat Paripurna DPR, Jumat (16/8). “Sebetulnya dari awal sampai akhir, Pak SBY memberikan penjelasan yang sangat konfrehensif. Kita lihat dari mulai pertumbuhan ekonomi yang rata-rata 5,5% dan In-syaAllah yang sekarang sekitar 6,5%. Itu sudah luar biasa. Kalau prediksi IMF dan bank dunia hanya 3,5%,” ungkap Atte.

Postur RAPBN ini dinilai Atte sangat ekspansif. Seperti diketahui total anggaran pendapatan negara hampir Rp1.662 triliun. Sedangkan anggaran belanja negara sebesar Rp1.816 triliun. “Maka kalau kita lihat RAPBN 2014 direncanakan tetap ekspansif dan defisit anggaran itu hanya cukup 1,4% terhadap PDB yang sekitar Rp154 triliun.”

Menurut Anggota F-PD ini, defisit RAPBN 2014 ternyata lebih rendah daripada APBN-P 2013 yang sekitar 2,38%. “Di

sini presiden sangat hati-hati. Itu menariknya,” ucap Atte. Sementara soal penurunan rasio utang pemerintah terhadap PDB yang di negara-negara kolap bisa di atas 30%, maka di Indonesia, kata Atte, dipelihara pada 22,23%.



Anggota Komisi VI DPR Atte Sugandi.

Namun demikian, Atte berharap di masa yang akan datang harus secara perlahan dan pasti mengurangi rasio utang kita. Kalau bisa kurang dari 20%. “Tapi, bila kini mencapai 22% saja, itu sudah bagus. Ini juga merupakan beban utang pemerintahan yang lalu. Tapi, tetap kita menanggungnya. Menurut saya, angkanya masih tinggi. Tapi, harus lebih rendah lagi dari itu,” ujar Atte.

Sementara menyangkut pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN 2014, harus dipelihara di atas 6%. Semua pertumbuhan ekonomi tersebut ditujukan untuk program-program pemerintah seperti pengentasan kemiskinan, meningkatkan lapangan pekerjaan, dan menjaga lingkungan hidup yang berkesinambungan.

Soal menjaga lingkungan hidup tentu sangat terkait dengan pemeliharaan sumber daya alam (SDA) yang ada. “Jangan sampai SDA kita dikeruk habis-habisan hingga anak cucu kita tidak kebagian.” (mh) foto:doc/parle.

Pidato Presiden Tidak Menjawab Seluruh Persoalan



Ketua Komisi VIII DPR Ida Fauziyah.

Ketua Komisi VIII DPR RI, Ida Fauziyah menyambut positif Pidato Kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Jumat (16/8). Terutama yang me-

nempatkan perbedaan agama sebagai sesuatu yang tidak harus dipertentangkan.

“Memang tidak mudah dalam pidato yang singkat untuk bisa merespon seluruh kondisi bangsa yang kompleks,” ujar Ida.

Meski demikian Ida menganggap pidato tersebut tidak serta merta menjawab seluruh persoalan yang ada. Bahkan menurutnya banyak isu-isu aktual yang masih menunggu perhatian dan solusi dari pemerintah. Dalam bidang agama misalnya, perbedaan agama memang tidak harus dipertentangkan. Namun ketika hal tersebut sudah menimbulkan konflik, tentu harus ada sebuah solusi atau

pemecahannya.

“Solusi yang dimaksud tentu bukan sekedar himbauan, melainkan desakan untuk berbuat sesuatu, mencari solusi terbaik untuk semuanya,” ungkap Ida.

Ditambahkannya, penegakan hukum terhadap para pelanggar hukum tetap harus ditegakkan. Termasuk pelanggaran hukum terhadap kaum minoritas tetap harus dikenakan sanksi hukum yang tegas. Bahkan kebebasan beribadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing juga terus harus dijunjung tinggi. Untuk itulah menurut Ida, ia berharap agar pemerintah dapat segera mencari solusi yang terbaik untuk semua pihak, agar konflik serupa tidak terjadi lagi. (Ayu) Foto:ry/parle.

Dirgahayu RI ke-68 Momentum Bangun Kebersamaan Rakyat Indonesia



Ketua DPR Marzuki Alie.

Dirgahayu Kemerdekaan RI ke 68 merupakan salah satu bentuk Momentum dalam membangun kebersamaan bagi

rakyat Indonesia. Pasalnya, masih banyak menyisakan berbagai persoalan kebangsaan yang krusial.

Demikian pendapat Ketua DPR Marzuki Alie menanggapi makna Kemerdekaan NKRI ke 68, di Gedung DPR, Jum'at, (16/8).

Menurut Marzuki, masih adanya gap antara kaya dan miskin meskipun *income* perkapita Indonesia meningkat. "Kita harus melangkah kedepan bagaimana dapat mengurangi gap dengan menekan serendah mungkin," ujarnya.

Dia menambahkan, masih adanya persoalan penegakan hukum yang masih diskriminatif. "Ini harus menjadi momentum baik dalam perbaikan hukum kedepannya," tambahnya.

Selain itu untuk DPR RI, lanjutnya, masih perlu membenahi produk legislasi dengan berfokus kepada program yang pro rakyat dan memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia. "Anggaran juga harus dialokasikan kepada program yang sifatnya urgen dan dibutuhkan kepada masyarakat," jelasnya. (si) Foto:od/parle.

Rieke Nilai Pidato Presiden Jauh Panggang dari Api



Anggota DPR Rieke Diah Pitaloka.

Anggota DPR RI, Rieke Diah Pitaloka menilai Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam rangka

Penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2014, Jumat (16/7) masih jauh panggang dari api.

Rieke menyoroti dua point Pidato Presiden untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai bidang komisinya (Komisi IX DPR RI).

Menurut Rieke, dalam pidatonya, SBY menyebutkan anggaran Kesehatan Rp 44,9 Triliun. Itu tidak lebih dari 2,8% dari APBN Rp 1.816,7 Triliun.

"Artinya ini tidak memenuhi putusan UU yang seharusnya 5% diluar gaji. Lalu kemudian kalau niatnya adalah menyelesaikan buruh tak terampil, kita bandingkan Anggaran Kemenakertrans 2013 hanya Rp 4 Triliun. Untuk Tahun

2014 ini saya yakin tidak lebih dari Rp 5 Triliun. Bandingkan dengan alokasi anggaran untuk membayar bunga hutang luar negeri senilai Rp 300,2 Triliun," papar Rieke usai mengikuti Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang I Tahun Sidang 2013-2014 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

"Berapa kali anggaran kesehatan, berapa kali anggaran pendidikan, berapa kali anggaran ketenagakerjaan," tukasnya.

Hal ini, kata Rieke, menjadi PR bagi anggota DPR RI. Menurutnya pidato kali ini tetap tidak berubah dari gaya yang lama, tetap berisi pencitraan belaka. (sc) Foto:ry/parle.

Anggaran Polri dan TNI Dinilai Tidak Berimbang

Alokasi anggaran Kementerian Pertahanan sebesar Rp 83,4 Triliun yang disebutkan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidatonya dihadapan Rapat Paripurna DPR RI, Jumat (16/7) dinilai tidak berimbang, dibandingkan dengan anggaran Kepolisian sebesar Rp 41,5 Triliun.

Pasalnya anggaran Kementerian Pertahanan Rp 83,7 Triliun tersebut untuk lima unit organisasi yaitu Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, dan TNI AU.

Penilaian tersebut disampaikan Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq usai mengikuti Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Sidang I Tahun Sidang 2013-2014 dan Pidato Presiden RI dalam rangka penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2014 di Gedung DPR RI, Jumat (16/7)

“Di pengantar nota keuangan ini memang Kementerian Pertahanan mendapatkan alokasi anggaran terbesar. Tetapi yang harus dipahami, anggaran Rp 83,7 Triliun itu untuk lima unit organisasi yaitu Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, dan TNI AU,” papar Mahfudz.

“Semuanya itu bukan untuk Alat Utama Sistem Senjata (Alut Sista). Itu untuk Alut Sista, Modernisasi, Belanja Rutin termasuk Gaji personil,” tambahnya.

Menurut Mahfudz, porsi untuk Alut Sista sendiri tidak terlalu besar, dan untuk kesejahteraan sudah ada

indikasi peningkatan walaupun ini disejajarkan dengan peningkatan gaji PNS dan Prajurit TNI/Polri sekitar 6% dari gaji pokok.

Yang dibutuhkan sekarang adalah Tunjangan Khusus untuk prajurit yang ditugaskan di daerah-daerah terpencil atau tugas-tugas khusus, karena memang kebutuhan mereka itu jauh melampaui tunjangan minimal yang mereka dapatkan. Jadi ini yang masih harus dieksplorasi lagi.

“Sebenarnya melihat anggaran Kepolisian sebesar Rp 41,5 Triliun itu hanya untuk satu unit Polri, ya memang tidak berimbang, tetap Polisi jauh lebih tinggi proporsinya dibandingkan TNI,” kata politisi PKS ini.

Jika kita lihat pidato kenegaraan tadi pagi (Sidang Bersama DPR dan DPD RI), kata Mahfudz, point keempat yang ditekankan SBY adalah memastikan keutuhan kedaulatan NKRI dari potensi ancaman-ancaman yang sekarang ini menguat.

Dan salah satu fungsi menjaga kedaulatan NKRI sebenarnya fungsi pertahanan. “Saya berharap nanti saat pembahasan antara pemerintah dengan DPR masih diexercise lagi peluang-peluang untuk penambahan alokasi anggaran TNI terutama untuk



Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq.

wilayah-wilayah perbatasan,” tegasnya.

Hal itu dilakukan untuk menyeimbangkan proporsi belanja alut sista dan kesejahteraan yang mana sudah disuarakan DPR sejak dua tahun lalu, tetapi memang alokasi anggaran yang belum memadai yang membuat proporsi kesejahteraan ini masih jauh dari modernisasi alut sista, tapi ini yang masih akan terus dikaji, kita cari peluang-peluangnya, papar Mahfudz.

“Mestinya anggaran ini berimbang, modernisasi alut sista berjalan tapi kesejahteraan prajurit tertinggal ini terjadi demoralisasi juga. Karena kesejahteraan itu menyangkut tunjangan dan menyangkut sarana perumahan. Dan sarana perumahan prajurit ini yang sangat memprihatinkan terutama di daerah,” jelasnya mengakhiri.

(sc) foto:ry/parle.

Ketua DPR Gelar *Open House* di Hari Nan Fitri

Idul Fitri merupakan bagian dari membersihkan diri, menjadikan jati diri yang bersih dan suci. Hal tersebut diungkapkan Ketua DPR RI, Marzuki Alie saat menggelar *Open House* di rumah dinas di Komplek Widya Chandra, Jakarta, Kamis (8/8).

Ditambahkan Marzuki, selama bulan Ramadhan sudah banyak amaliah yang dilakukan, dan itu merupakan hubungan setiap insan dengan Sang Khalik. Sementara Idul Fitri merupakan saat yang tepat untuk memperbaiki hubungan dengan sesama manusia atau *Habluminanas*.



Ketua DPR RI Marzuki Alie menerima ucapan Selamat Idul Fitri.

“Idul Fitri adalah saat yang tepat untuk saling berbagi serta menjalin silaturahmi dan kebersamaan. Zakat fitrah misalnya, dapat dimanfaatkan sebagai “alat” untuk mem-

bangun kebersamaan di tengah masyarakat,” jelas Marzuki.

Oleh karena itu, di hari nan fitri itu Marzuki menilai itulah kesempatan bagi setiap insan untuk saling berbagi. Tentunya berbagi kepada masyarakat yang kurang mampu. Dengan kesadaran untuk saling membantu itu, maka di hari nan suci itu setiap insan dapat bersuka cita merayakan hari kemenangan.

Sebelum menggelar *Open House*, Marzuki beserta istri, Asmawati Marzuki terlebih dahulu Sholat Idul Fitri, yang disusul dengan silaturahmi di Istana dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ani Yudhoyono, serta Wapres, Boediono beserta Herawati Boediono, juga para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, dan beberapa tokoh, Pejabat Negara RI.

Sementara itu, dalam *Open House* di rumah dinas Ketua DPR, selain masyarakat umum dari berbagai pelosok daerah, acara juga dihadiri oleh beberapa tokoh nasional, pejabat Negara, anggota DPR/MPR, serta para duta besar dari beberapa Negara sahabat seperti Amerika Serikat, Mesir, Bangladesh, Vietnam dan Yaman. (wy/ayu)foto:wahyu/parle

Komisi VII Soroti Pola Distribusi dan Pengawasan Kuota BBM

Anggota Komisi VII DPR RI Satya W. Yudha (F-PG) menyoroti soal pola distribusi dan pengawasan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Pasalnya, marak terjadi penimbunan BBM di berbagai daerah.

“Kita sering mendapatkan permintaan penambahan kuota dari Pertamina, bahkan Pertamina kerap berkomunikasi dengan Menteri Keuangan dan lain sebagainya. Dalam rangka seperti itu ada lonjakan kuota secara nasional ditambah nanti ada permintaan khusus juga diakhir tahun atau menjelang akhir tahun terhadap kuota BBM bersubsidi, bukan yang non subsidi, yang nanti akhirnya harus mendapatkan persetujuan DPR,” kata anggota DPR Satya W. Yudha saat meninjau langsung Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) di Tanjung Perak, Jawa Timur, baru-baru ini kepada Parlemen.

Menurutnya, setiap hari kita menyaksikan banyak sekali orang menjual BBM eceran, yang akhirnya itu menjadi tujuan utama daripada pemudik kalau memang dia tidak bisa menemukan SPBU. “Kita harus menyadari dengan adanya penjualan eceran berarti ada penimbunan, berarti disitu ada satu sistem pola distribusi yang tidak semestinya berjalan dengan baik. hal ini mesti kita sadari bersama, kalau masih banyak penjualan BBM eceran pasti mereka mendapatkan-

nya secara tidak benar,” ujarnya.

Satya meminta agar Pertamina turut serta di dalam mekanisme pendistribusian tadi, termasuk didalamnya adalah kuota BBM sehingga kekurangan bisa dipenuhi, tidak melalui eceran atau tidak melalui botol-botolan. “Karena itu akses sebetulnya dari ketidakrapihan di dalam manajemen terdistribusi kita,” tambahnya.



Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Zainuddin Amali.

Guna menghadapi Hari Raya, menurut Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Zainuddin Amali, Pertamina sendiri sudah memiliki kesiapan dan standar. Yang kita sangat utamakan adalah bagaimana masyarakat pada saat membutuhkan BBM itu mereka tidak kesusahan mencari, tidak antre yang berkepanjangan seperti tahun-tahun sebelumnya.

Sementara Direksi Pertamina Affandi membenarkan bahwa Pertamina akan mengantisipasi dengan berbagai sisi operasi, baik itu penambahan jam kerja operasional di TBBM kami maupun menambah mobil-mobil tangki. “Jadi dasar ini kami perkirakan untuk persiapan supplynya, termasuk diurus balik yang kita perkirakan hanya dua hari, ini juga menjadi krusial tersendiri,” jelasnya. (iw)/foto:iwan armanias/parle.

Tak Ada Cuti Beramal Baik

Sekretariat Jenderal DPR RI menggelar halal bil halal, usai libur lebaran, Selasa (13/8). Selain dihadiri Sekretaris Jenderal DPR RI Winantuningtyastiti, Wakil Sekjen Achmad Djuned, juga dihadiri mantan Sekjen dan Wasekjen DPR, para pejabat dan seluruh staf di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.

Dalam sambutannya, Sekjen DPR Winantuningtyastiti, mengatakan, ini kesempatan baik untuk saling memaafkan. Setelah sebulan penuh beribadah di bulan suci Ramadan, Sekjen menghimbau agar melanjutkan amal kebajikan di bulan berikutnya. "Tak ada cuti beramal. Harus terus menerus," tandas Sekjen.

Selama Ramadan, lanjut Sekjen, selalu ada suasana yang berbeda. Kepedulian sosial kita meningkat, terutama kepedulian kepada anak yatim

dan fakir miskin. Bila sudah melewati Ramadan, berarti kita sudah melewati hambatan dan terus melanjutkan amal kebajikan.

Menurut Sekjen, tradisi berpuasa sangat menyehatkan. Puasa tidak saja menyehatkan rohani, tapi juga menyehatkan jasmani. Membiasakan diri berpuasa Senin dan Kamis usai Ramadan adalah tradisi yang sangat baik. Suasana kejiwaan pun jadi lebih tenang dan terkendali.

Acara terlihat meriah dengan suasana yang sangat akrab dan penuh kekeluargaan. Momen itu tentu dimanfaatkan untuk bertemu kembali dengan rekan-rekan kerja, setelah beberapa hari libur Lebaran. Berjabat tangan dan saling memaafkan menjadi pemandangan indah dalam acara tersebut. (mh) foto:wy/parle.



Sekjen DPR Winantuningtyastiti

DPR Harapkan Miliki Law Center



Ketua DPR Marzuki Alie.

Untuk meningkatkan kinerja DPR RI di bidang legislasi, Ketua DPR Marzuki Alie bercita-cita membentuk *law center* (LC) yang selama ini belum dimiliki DPR. Banyak UU monumental yang sudah dihasilkan DPR.

Kehadiran LC akan sangat membantu prolegnas di DPR. Bila pemerintah sudah punya Badan Hukum Nasional, maka DPR juga perlu membentuk semacam LC tersebut. Keberadaan LC nantinya akan memperkuat basis data dalam penyusunan RUU.

"Law center yang saya cita-citakan inilah, yang nanti kalau sudah terbentuk, akan membantu penyelesaian RUU lebih cepat," kata Marzuki baru-baru ini. Saat ini, lanjut Marzuki, banyak UU monumental yang telah dihasilkan dan berdampak sangat positif bagi kepentingan rakyat.

Sebut saja misalnya, UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), UU Pengelolaan Zakat, UU Lembaga Keuangan Mikro, UU Bantuan Hukum, UU Pemberdayaan dan Perlindungan Petani, dan UU Perumahan dan Permukiman. Selain itu ada juga RUU yang segera diselesaikan, yaitu RUU Pangan, RUU Tabungan Perumahan Rakyat, RUU Desa, dan masih banyak lainnya.

Lebih lanjut Marzuki juga menjelaskan, RUU KUHP masih terus dibahas di DPR. Bila kelak RUU ini sudah diundangkan, maka akan menjadi prestasi luar biasa dari para anak bangsa. Betapa tidak, selama ini bangsa Indonesia masih menggunakan KUHP warisan kolonial. Sementara KUHAP-nya sendiri juga mempunyai banyak kelemahan. KUHAP sudah diberlakukan selama 30 tahun dalam praktik peradilan di Indonesia.

Selain itu, ada juga RUU Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (PPILN) yang saat ini tengah direvisi, menggantikan UU No.39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri (LN) yang masih minim dalam hal pengaturan kebijakan perlindungan bagi TKI di LN. (mh) foto:od/parle.

Dewan Khawatirkan Ketersediaan Listrik Bandara Kuala Namu

Terkait adanya krisis energi di Sumatera Utara sebesar 150 Mega Watt, Anggota Tim Kunjungan Spesifik Komisi VII DPR RI, Jamaluddin Jafar mempertanyakan kesiapan PT. Angkasa Pura II sebagai pengelola Bandara Udara Internasional Kuala Namu di Sumatera Utara (Sumut) ketika terjadi mati listrik.

“Bandara Kuala Namu merupakan kebanggaan masyarakat Sumut, saat pertemuan dengan General Manager PT. Angkasa Pura II, Tengku Said Ridwan di Kantor PT. Angkasa Pura II, Kuala Namu, Sumatera Utara beberapa waktu lalu.

Hal tersebut, disampaikannya saat Tim Komisi VII DPR RI melakukan pertemuan dengan General Manager PT. Angkasa Pura II, Tengku Said Ridwan di Kantor PT. Angkasa Pura II, Kuala Namu, Sumatera Utara beberapa waktu lalu.

Sementara, Idris Lutfi (F-PKS) menyatakan bangga dengan mulai beroperasinya Bandara Internasional Kuala Namu. Namun Idris menyayangkan banyaknya masyarakat sekitar bandara di areal terminal penumpang Bandara Kuala Namu.

“Sebelum dibuka mestinya ada semacam open house dulu, agar masyarakat melihat-lihat sebelum mulai beroperasi,” kata Lutfi.

Lutfi juga menyayangkan belum adanya rambu-rambu dan marka jalan di jalan menuju Bandara karena sangat membahayakan pengguna jalan. “Berbahaya, karena ada belokan kemudian tiba-tiba jalan dibuat dua jalur. Apakah sudah berkoordinasi dengan Polda dan Pemda setempat,” tanya Lutfi.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Tim yang juga Ketua Komisi VII, Sutan Bhatogana menyatakan Bandara



Tim Kunjungan Spesifik Komisi VII mengunjungi Bandara Kuala Namu di Sumatera Utara.

Kuala Namu ini tidak akan bisa berjalan tanpa didukung oleh sumber energi. “Oleh sebab itu kami dari Komisi Energi DPR tidak menginginkan Kuala Namu ini seperti yang terjadi di Jakarta yang beberapa kali mati lampunya sehingga pesawat takut mendarat kemudian kembali ke asalnya,” tukas Sutan.

“Empati kami sebagai Komisi Energi ingin melihat persiapan-persiapan, kami sudah memanggil Pertamina dan PLN, kami melihat kesiapan Kuala Namu ini dari sisi Energi,” tambah Sutan.

Sutan juga menjelaskan adanya defisit listrik sampai 150 Mega Watt di Sumut dan PLN menyatakan baru bisa sekian puluh persen terpenuhi dari 90 persen yang dibutuhkan dan dikhawatirkan bisa mati. Kalau dari Pertamina sendiri, kata Sutan, GM Pertamina wilayah Sumut sudah menjamin ketersediaan energi bagi Bandara, dan Pertamina sudah membangun cadangan-cadangan untuk ketersediaan BBM dan Avtur, tidak terlalu kita khawatirkan.

“Kami ingin operasionalisasi Banda-

ra Kuala Namu benar-benar didukung oleh energi yang tersedia dan listrik yang tersedia, sehingga Bandara Kuala Namu menjadi bandara kebanggaan masyarakat Sumut pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya, sehingga menjadi bandara termodern di Asia Tenggara,” tandas Sutan.

Menjawab pertanyaan Tim Komisi VII, GM PT. Angkasa Pura II, Tengku Said Ridwan menyatakan bahwa Bandara Internasional Kuala Namu sudah dilengkapi dengan sistem *Under Develop Power Supply* (UPS).

“Jadi tadi yang dikhawatirkan PLN, apabila PLN mati dan pindah ke Genset, untuk sistemnya kita sudah *back up* dengan *Under Develop Power Supply* (UPS). Artinya ketika PLN mati otomatis Genset langsung bisa hidup dalam waktu 25 detik, termasuk juga diback up UPS, jadi tidak ada yang putus,” jelas Ridwan.

Dari sisi kelistrikan, kata Ridwan, alhamdulillah sudah ada sistem yang *memback-up*nya. Hanya memang kekhawatiran itu tetap ada, karena Bandara merupakan pelanggan terbe-

sar yaitu menggunakan 23 Mega Watt. Sementara PLN sendiri kapasitasnya baru 40 Mega Watt ditambah Inalum memberikan untuk Sumatera Utara ini lebih kurang 450 Mega Watt.

Ridwan juga melaporkan bahwa perpindahan dari Bandara Polonia ke Bandara Kuala Namu berjalan lancar, tidak terjadi suatu kendala apapun.

Bandara Kuala Namu menjadi kebanggaan masyarakat Sumatera Utara, karena selama ini Bandara Polonia benar-benar sudah sesak, kapasitas terminal penumpang yang dapat menumpang 900 ribu penum-

pang pertahun dijejali sampai tujuh juta penumpang pertahun.

“Di Kuala Namu ini kapasitasnya sampai delapan juta pertahun. Saat ini sudah mendekati delapan juta pertahun,” kata Ridwan.

Bandara Polonia Medan luasnya 14 ribu meter persegi, sementara luas Bandara Kuala Namu saat ini mencapai 95 ribu meter persegi. Untuk jangkauan luasan lebih nyaman dibandingkan dengan Bandara Polonia.

“Hanya saat ini euphoria dari masyarakat melihat Bandara kebanggaannya

seperti yang bapak saksikan, kami sudah cukup capek, artinya bentor, sepeda motor banyak masuk ke bandara. Kami sudah melarang sepeda motor tidak boleh masuk terminal harus masuk parkir tapi apa yang terjadi, berjubel, ini perlu ketegasan dari kita semua untuk mengantisipasi ke depannya, kalau tidak dikhawatirkan akan timbul ojek-okej,” imbuhnya.

“Untuk rambu-rambu dan marka jalan, kami memang sudah berkoordinasi dengan Pemda dan Polda setempat, namun memang belum semuanya terpenuhi,” tambahnya. (sc)

Sekjen DPR Serahkan Zakat kepada Mustahiq di Lingkungan Kesetjenan

Unit Pelayanan Zakat (UPZ) DPR, MPR dan DPD RI Jumat (2/8) menyalurkan Zakat kepada para Mustahiq (orang yang berhak menerima zakat) yang ada di lingkungan gedung parlemen, Senayan Jakarta.

Para Mustahiq yang dimaksud adalah *Cleaning Service* dan Petugas Taman dan Lapangan yang ada di lingkungan gedung DPR, MPR dan DPD RI. Acara penyerahan zakat dilakukan oleh Sekjen DPR RI, Winantuningtyastiti yang mewakili para Muzaki (orang yang wajib mengeluarkan zakat, infak dan sodakoh) kepada Abdul Rohim selaku Koordinator CV Taman.

Dalam sambutannya Win, begitu ia biasa disapa, mengatakan bahwa penyerahan zakat tahun ini oleh UPZ sudah yang ke-7 kalinya. Hal ini karena kesadaran dari para pejabat di Kesetjenan DPR RI untuk mensucikan harta yang di dapatnya dengan cara berbagi dengan sesama, terlebih lagi di bulan yang penuh Rahmat ini.

“Bagaimanapun juga kesuksesan anggota dewan dalam menjalankan tugas-tugasnya juga atas peran serta saudara-saudara kita, *cleaning service* ini yang membuat bersih lingkungan kompleks DPR, sehingga membuat nyaman anggota dewan dalam menjalankan tugas-tugasnya,” ungkap Win.

Win berharap agar budaya yang sangat baik ini dapat

terus di lestarian. Bahkan ia berharap ke depannya dapat menemukan sebuah sistem yang lebih baik lagi yang akan mempermudah seluruh pejabat dan karyawan di kesetjenan DPR RI untuk menyalurkan sebagian rizki yang dimilikinya. Hal itu mengingat selama ini tidak seluruh karyawan kesetjenan DPR mengetahui adanya UPZ yang dapat menyalurkan zakat kepada para Mustahiq.

Sementara itu, Ketua Pelaksana Harian UPZ DPR RI, Ichsanudin mengakui bahwa dalam setiap tahunnya jumlah Mustahiq yang menerima zakat terus bertambah, sementara para Muzakinya tetap sama. Ditambahkan anggota pelaksana Harian UPZ, Sophan Aminudin, ia berharap agar niat yang baik ini juga dapat disosialisasikan kepada para anggota dewan, agar para Mustahiq yang notabene berada di lingkungan terdekatnya dapat terbantu, terlebih lagi saat menghadapi hari raya Idul Fitri.

Selain penyerahan zakat, pada kesempatan itu juga dikumandangkan pembacaan ayat suci Al Quran surat At Taubah ayat 60 dan Surat Humazah yang dibacakan oleh Ustad Jalaludin. Acara ditutup dengan doa bersama yang dipandu oleh Ustad Sophan Aminudin, agar seluruh pejabat dan karyawan di Kesetjenan DPR RI selalu mendapat Rahmat dan barokah dari Allah SWT sehingga dapat terus menjalankan tugasnya dengan baik. (Ayu) foto:od/parle.



Sekjen DPR RI, Winantuningtyastiti saat menyerahkan zakat.

Pemimpin Ke Depan Harus Berkarakter



Anggota Komisi X DPR Nurul Qomar.

Menanggapi Pidato Kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudoyono soal demokrasi, banyak anggota DPR berharap Pemilu tahun depan lebih berkualitas dan melahirkan pemimpin yang berkarakter.

Anggota DPR dari F-PD Nurul Qomar berkomentar secara eksklusif kepada Parlemen usai mengikuti pidato kenegaraan presiden. Demokrasi memang membutuhkan biaya. “Tapi dari waktu ke waktu nampaknya beliau (presiden) berharap untuk terus men-

desain format Pemilu ke depan lebih efisien, ekonomis, tapi efektif,” ucap Qomar.

Presiden, kata Qomar, sempat menyebutkan angka yang begitu fantastis untuk anggaran Pemilu. Disebutkan dalam pidato presiden anggaran Pemilu sebesar Rp17 triliun. “Seperti juga harapan kita semua, Pemilu ke depan berjalan dengan demokratis dan aman supaya tidak mubazir dengan dana yang begitu besar,” katanya.

Sementara itu dalam konteks keindonesiaan, Anggota Komisi X ini berharap pemimpin ke depan harus punya karakteristik *siddik*, *amanah*, *tablig*, dan *fathonah*. Atau dalam pengertian lain, pemimpin itu harus jujur, amanah, dan bisa dipercaya.

“Ada pesan moral dari Bapak Presiden tentang bagaimana kita mengedepankan kesederhanaan, efisiensi, ekonomis, tapi efektif. Itu yang harus kita lakukan dalam menegakkan demokrasi.” (mh) foto:wy/parle.

Pendidikan Indikator Pencapaian Kesejahteraan

Indonesia yang memiliki jumlah penduduk 240 juta jiwa, sangat disayangkan jika tidak bisa berkompetisi dengan negara-negara sekitar, khususnya di bidang pendidikan.

Salah satu indikator pencapaian kesejahteraan adalah pendidikan. “Saya dari Komisi X merasa senang, ada banyak program pro rakyat. Salah satunya adalah program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).

Dengan begitu, tidak ada lagi angka putus sekolah dan angka buta huruf. Anak-anak harus kita dorong untuk sekolah.” kata anggota Komisi X Venna Melinda usai mendengarkan pidato kenegaraan Presiden SBY, Jumat (16/8).

Masyarakat juga harus membantu pemerintah mereali-



Anggota Komisi X DPR Venna Melinda.

sasikan program-programnya. “Tidak bisalah pemerintah punya kebijakan bagus, tapi masyarakatnya tidak bisa bantu pemerintah,” kata Venna.

Ditanya masalah Pemilu yang akan datang, Venna mengatakan, Pemimpin Indonesia masa depan harus mampu menyejahterakan masyarakat Indonesia. Lewat Pemilu yang adil dan jujur, pemimpin masa depan akan segera lahir.

Sementara mengomentari pidato presiden soal HUT RI ke-68 tahun, Venna menilai, NKRI sudah harga mati seperti juga sudah disampaikan

presiden. “Masyarakat juga harus ikut berjuang menjaga keutuhan NKRI dengan caranya masing-masing. Ini, kan, sudah disampaikan tiga indikator pencapaian kesuksesan yang selama ini pemerintah sudah bekerja keras bersama DPR dan DPD,” katanya. (mh) foto:od/parle.

Pemerintah Harus Benahi Administrasi Keuangan

Terkait penyusunan dan penggunaan anggaran, pemerintah diminta mencari format terbaik untuk membenahi administrasi keuangan negara. Demikian disampaikan Ketua DPR RI Marzuki Alie dalam Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Persidangan I yang dihadiri Presiden dan Wakil Presiden.

“Pada masa Persidangan I Tahun 2013-2014 ini, dewan akan melanjutkan pembahasan terhadap RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2012. Sejak disampaikan pada masa sidang sebelumnya, dewan mengkritisi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN tahun anggaran 2012 (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat) yang sudah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan,” ungkap Marzuki.

Dalam hal pencairan anggaran, Marzuki mengatakan, perlu ada penyederhanaan proses pencairan anggaran dan pelaksanaan kegiatannya juga harus tepat waktu. Ini dimaksudkan agar APBN benar-benar dapat menjadi lokomotif pembangunan ekonomi nasional.

“Terhadap berbagai permasalahan tersebut, dewan meminta kepada pemerintah untuk meningkatkan upaya penciptaan tertib dan disiplin anggaran, mulai dari tahap perencanaan,



Ketua DPR Marzuki Alie saat menyampaikan Pidato pada Pembukaan Masa Persidangan.

pelaksanaan anggaran, pengendalian, dan penyusunan pertanggungjawaban, sehingga sesuai dengan amanat UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.”

Pemerintah juga dihimbau Marzuki agar memperkuat regulasi terkait kepatuhan terhadap UU tersebut. Di sisi lain, laporan BPK terhadap APBN 2012, DPR menilai ada kelemahan penganggaran dan penggunaan anggaran belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial.

Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), lanjut Marzuki, yang disimpulkan BPK untuk beberapa kementerian dan lembaga mengindikasikan bahwa pengelolaan keuangan negara masih harus ditingkatkan dari tahun ke tahun. “Permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pencatatan hasil inventarisasi dan penilaian aset tetap dan aset eks BPPN, belum didasarkan pada dokumen valid dan belum disajikan sesuai nilai bersih,” ucap Marzuki. (mh) foto: wy/parle.

DPR Minta Peran Bulog Diperkuat

Tak dipungkiri, kenaikan harga BBM berimbas pada meningkatnya harga barang-barang, terutama harga barang kebutuhan pokok. Melihat hal ini, Anggota Dewan menyarankan kepada Pemerintah agar peran Bulog diperkuat guna menstabilkan harga kebutuhan pokok.

Hal itu disampaikan Ketua DPR Marzuki Alie pada Pidato Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2013-2014. Dalam acara ini juga, Presiden Susilo Bambang Yu-

dhoyono menyampaikan pidato dalam rangka Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU APBN 2014 dan Nota Keuangannya.

Marzuki menyatakan, target inflasi kumulatif selama tahun 2013 yang semula disepakati 4,9% menjadi 7,2% hingga akhir tahun 2013 harus dicermati. Dewan menilai target inflasi tahun 2013 cukup tinggi, dikhawatirkan mendekati dua digit, jika pemerintah tidak mengambil langkah yang strategis.



Ketua DPR Marzuki Alie.

“Psikologi pasar mengingatkan kita, sulit untuk menurunkan harga barang yang tingkat elastisitas terhadap harga yang permintaannya tinggi. Fenomena ini terjadi terutama terhadap harga kebutuhan pokok,” jelas Marzuki di hadapan peserta sidang, di Gedung Nusantara, Jumat (16/7).

Terkait dengan pendapatan negara, tambah Marzuki, Dewan mendesak pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara bukan pajak dari pengelolaan Sumber Daya Alam. Paradigma yang menggantungkan perolehan devisa dari ekspor komoditi primer sumber daya alam, harus segera ditinggalkan. Sebab, kekayaan sumber

daya alam bersifat bisa habis dan tidak bisa diperbarui.

“Dewan sangat mendukung kebijakan politik pemanfaatan sumber daya alam yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah komoditi hasil tambang,” jelas Marzuki. (sf) *foto:wy/parle.*

UU No. 39 Tahun 2004 Belum Lindungi TKI



Undang-undang (UU) No.39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri belum memberi perlindungan menyeluruh bagi para TKI. Dan DPR sudah menyiapkan RUU baru untuk melindungi TKI secara menyeluruh. Demikian salah satu bagian dalam Pidato Ketua DPR pada Rapat Paripurna DPR Masa Sidang I, Jumat (16/8).

Kasus-kasus mutakhir di bidang ketenagakerjaan selalu mendapat perhatian serius DPR, terutama menyangkut TKI di luar negeri. Untuk itu, perhatian terhadap regulasinya menjadi konsen DPR untuk merumuskannya, agar para TKI mendapat perlindungan dan kesejahteraan yang layak.

“Permasalahan buruh, pemutusan hubungan kerja, tunjangan hari raya, tenaga alih daya, dan permasalahan TKI dengankasus-kasus terbaru, senantiasa mendapat perhatian dewan,” tandas Marzuki dalam pidato pengantarnya. Bahkan, lanjut Marzuki, pimpinan komisi terkait di DPR

telah melakukan dua kali rapat konsultasi dengan para menteri terkait untuk menuntaskan amnesti yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada para WNI yang *overstayer* dan non-prosedural.

Para pekerja Indonesia yang *overstayer* itu harus diberikan pelayanan yang sebaik-baiknya agar mereka betul-betul merasakan ada perlindungan dari pemerintah Indonesia bagi WNI di luar negeri. Dan pemerintah Arab Saudi kebetulan telah memperpanjang amnesti hingga tanggal 3 November 2013.

“Perlu kita apresiasi. Namun, demikian perpanjangan amnestitersebut tidak ada artinya jika tidak ada perubahan pola pelayanan. Untuk itu, Kemenakertras dan Kemenlu harus bekerja sama dengan baik dalam mengambil kebijakan yang terkait dengan masalah perlindungan TKI di luar negeri.” (mh) *foto:ry/parle.*

Tiga Perhatian DPR Terhadap Pelaksanaan APBN 2014

Pelaksanaan Anggaran dan Penda-patan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 akan dimulai pada 1 Januari 2014. Sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan, DPR akan memberikan perhatian terhadap pelaksanaannya. Pengawasan akan dilakukan oleh Alat Kelengkapan Dewan yang dimiliki oleh DPR.

“Pertama, tahun 2014 adalah tahun pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden yang diharapkan berlangsung aman dan tertib, stabilitas nasional tetap terjaga, kondisi politik berjalan kondusif yang semuanya akan berpengaruh pada perekonomian nasional,” jelas Ketua DPR Marzuki Alie pada Pidato Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2013-2014, di Gedung Nusantara, Jumat (16/7).

Kedua, tambah Marzuki, Pemerintahan Baru hasil Pemilihan Umum 2014 akan melaksanakan APBN Triwulan IV tahun 2014. Yang menjadi catatan adalah, Pemerintahan Baru hasil Pemilu 2014 harus tetap melaksanakan berbagai bentuk kesepakatan dan pembahasan yang telah dilakukan oleh DPR dan Pemerintah yang tertuang dalam UU APBN tahun 2014.

“Ketiga, tidak optimalnya realisasi penyerapan anggaran perlu menjadi



Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Ketua DPR RI Marzuki Alie.

perhatian kita, Dewan meminta penyerapan anggaran dapat terdistribusi secara merata, dan tidak menumpuk

pada Triwulan IV atau saat tahun anggaran akan berakhir,” tambah politisi Demokrat ini. (sf)

Sidak Wamenkum HAM ke LP Hanya Untuk Pencitraan

Berita tentang adanya pabrik ekstasi di dalam lembaga pemasyarakatan (LP) benar-benar telah mengejutkan publik. Dan sidak yang selama ini dilakukan Wamenkum HAM Deny Indrayana tak berpengaruh sama sekali.

Demikian disampaikan Anggota Komisi III DPR Ahmad Yani, usai mengikuti Acara Sidang Bersama untuk mende-

ngarkan Pidato Kenegaraan Presiden, Jumat (16/8). “Itu membuktikan kegagalan pola *treatment* atau pola sidak yang dilakukan oleh Wamenkum HAM selama ini. Itu menunjukkan apa yang dilakukan oleh Wamen selama ini, tidak lain hanya untuk pencitraan diri dia sendiri,” kata Yani.

Anggota F-PPP ini, tidak bisa me-

ngerti, bagaimana seorang Wamen selalu sidak ke setiap LP, bahkan tengah malam, tapi tidak mengetahui ada pabrik ekstasi di depan matanya sendiri. Apalagi pabrik itu tampaknya sudah berjalan lama. Menurut Yani, LP sudah menjadi wahana paling potensial untuk pasar obat-obatan terlarang. Apalagi tidak ada orang yang bisa mengawasi dalam ruang LP yang



Anggota Komisi III DPR Ahmad Yani.

sangat tertutup itu.

“Menurut saya harus dilakukan evaluasi total dalam menangani masalah narkoba ini,” ucap Yani. Tahanan hanya pemakai narkoba dan pengedar tidak boleh lagi digabung dalam satu LP. Hukuman yang maksimal harus diberikan kepada para mafia narkoba. Bila perlu hukuman mati bisa diterapkan kepada para mafia tersebut.

Para tahanan mafia narkoba, lanjut Yani, tidak bisa lagi ditempatkan di Jakarta. Ada pulau Galang, bekas ditempati para pengungsi. Lokasi itu bisa dirubah dan direhabilitasi lagi un-

tuk membangun LP “Itu saja dikelola, dibagusin, ditempatkan di sana, sambil mereka menunggu proses hukum,” katanya.

Yani juga berharap, agar para hakim tidak lagi bermain-main dengan putusannya. Terutama para Hakim Agung yang menjadi sorotan publik akhir-akhir ini. “Kita minta kepada hakim, terutama Hakim Agung jangan ada main-main lagi. Kemarin, kan, sudah ada hukuman mati. Diturunkan menjadi 15 tahun, bahkan dipalsukan lagi menjadi 12 tahun,” ungkap Yani. (mh) *foto:wy/parle.*

Ketua DPR Beri Santunan 1000 Anak Yatim



Ketua DPR Marzuki Alie didampingi Istri, Sekjen dan Wasekjen DPR berfoto bersama anak-anak yatim.

Suasana tampak ramai di Gedung Nusantara V, Jumat (2/8) sore. Dalam kesempatan itu, Ketua DPR Marzuki Alie mengundang 1000 anak yatim dari berbagai yayasan yang ada di Jakarta dan anggota Persatuan Tinju Amatir Indonesia (Pertina) untuk buka puasa

bersama dan pemberian santunan.

Dalam acara itu, Marzuki didampingi isteri, Asmawati Marzuki. Tampak hadir pula Sekjen DPR Winantuningtyastiti, para pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR, serta Imam Besar Madi-

nah Ustad Ali Zaber.

Marzuki, dalam sambutannya, menyatakan dalam sejarah DPR, belum pernah ada buka puasa bersama 1000 anak yatim. Sehingga, ia menyatakan keinginannya itu kepada Sekjen DPR, dan mendapat tanggapan yang baik.

“Saya sampaikan niat ini kepada Ibu Sekjen, dan mendapat respon positif. Semoga dengan kehadiran anak-anak yatim, suasana politik di DPR yang panas, kedepannya menjadi lebih adem, bersahabat, dan menunjukkan umat yang cinta kepada rakyatnya,” jelas politisi Demokrat ini.

Ia berharap, walaupun ia nanti tak menjabat lagi sebagai Pimpinan DPR, tradisi buka puasa bersama anak yatim tetap dilanjutkan. Anak-anak yatim ini yang akan menjadi pemimpin bangsa di masa depan, sehingga perlu diberi semangat dan kekuatan dalam menjalani kehidupan yang semakin berat karena tidak didampingi orangtuanya.

Usai buka puasa bersama, acara dilanjutkan dengan Shalat Magrib berjamaah dan pemberian santunan yang diberikan langsung oleh Ketua DPR. (sf) *Foto: wy/parle.*



Ketua DPR Marzuki Alie menerima wartawan teladan yang bertugas di daerah perbatasan.

DPR Apresiasi Jurnalis di Daerah Perbatasan

Ketua DPR Marzuki Alie mengapresiasi peran jurnalis di daerah perbatasan. "Rakyat harus diberikan informasi yang benar dan RRI merupakan salah satu alat informasi dalam menyebarkan informasi bagi masyarakat di daerah terpencil," ujarnya kepada wartawan teladan yang bertugas di daerah terpencil, di Gedung DPR, Jum'at, (16/8).

Menurut Marzuki, Indonesia sangat luas dan bukan hanya kota besar semata. "Karena itu, setiap sidang Parlemen Internasional, seperti Parlemen OKI yang diikuti oleh 48 negara, diadakan di Palembang, dan daerah lainnya seperti NTB, Mataram," tambahnya.

Dia menambahkan, sudah sepatutnya para Teladan dari daerah yg berada di beranda depan Indonesia mendapatkan apresiasi. "Wajar mereka mendapatkan teladan karena memang tidak semua orang mau bertahan di tempat yang jauh," jelasnya.

Dia mengatakan, para jurnalis tersebut bertugas tanpa tunjangan khusus tidak seperti guru yang mendapatkan tunjangan khusus. "Direksi juga tengah mempertimbangkan untuk memberikan remunerasi bagi wartawan yang bekerja jauh di pelosok beranda depan,"katanya.

Mereka (para jurnalis di daerah per-

batasan), lanjutnya, kerap menghadapi hambatan seperti sulit mendapatkan kebutuhan sehari-hari, bahkan juga harga BBM yang tinggi. "Kalau tidak hati-hati banyak yang pindah kewarganegaraan," ujarnya.

Dari penjelasan Direksi RRI, papar Marzuki, masih terdapat hambatan power listrik di wilayah perbatasan, karena itu guna menunjang siaran perbatasan perlu ditunjang energi listrik melalui pengadaan generator energi dengan menggunakan solar cell. "Investasi awal saja mahal tetapi maintainancenya murah kedepan,"paparnya.

(si) foto:od/parle.



Suasana Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI dengan acara Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka HUT ke-68 Kemerdekaan RI tahun 2013. Jumat (16/8). Foto: Iwan Armanias /Parle.



Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyerahkan RAPBN Tahun Anggaran 2014 beserta Nota Keuangannya kepada Ketua DPR RI Marzuki Ali. Jumat (16/8). Foto: Wahyu /Parle.



Pimpinan DPR RI foto bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sesuai Pidato Kenegaraan dalam rangka HUT ke-68 Kemerdekaan RI tahun 2013. Jumat (16/8). Foto: Eka Hindra/Parle.



Sekjen DPR RI Winantuningtyastiti didampingi Wasekjen DPR RI Achmad Djuned berhalal bihalal dengan Pejabat dan seluruh Karyawan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI, Selasa (13/8). Foto: Odjie, Wahyu /Parle.

